

## ABSTRAK

Penyusunan Memorandum Hukum ini memiliki rumusan masalah dengan latar belakang bahwa wewenang konkuren pemerintah adalah urusan pemerintah yang mencakup urusan pusat dan juga urusan daerah. Urusan ini dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintah yang wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintah yang wajib itu sendiri terdiri dari dua jenis yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana dalam penataan ruang ini termasuk ke dalam urusan wajib berhubungan dengan pelayanan dasar. Sehingga adanya perubahan wewenang pemerintah daerah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam perizinan penataan ruang.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut, terbitnya UU Cipta Kerja mengakibatkan ketakutan akan tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam penataan ruang. Penarikan wewenang pemerintah daerah menjadi wewenang pemerintah pusat membuat pemerintah pusat memiliki wewenang paling besar sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru jika tidak memiliki kemampuan membaca kebijakan pada tiap-tiap daerah di Indonesia.

**Kata Kunci :** pemerintah daerah, penataan ruang, UU cipta kerja

## ABSTRACT

*The preparation of this Legal Memorandum has a problem formulation with the background that the concurrent authority of the government is a government affair which includes central affairs as well as regional affairs. This matter is divided into two, namely mandatory government affairs and optional affairs. Mandatory government affairs itself consists of two types, namely mandatory affairs related to basic services and optional affairs not related to basic services, which in this spatial arrangement are included in mandatory affairs related to basic services. So that a change in the authority of the regional government affects the implementation of the regional government which results in the absence of legal certainty in spatial planning permits.*

*The results of this paper can be concluded as follows, the issuance of the Job Creation Law has resulted in fear of the absence of legal certainty and has implications for the administration of regional government, especially in spatial planning. Withdrawal of local government authority into the authority of the central government makes the central government have the greatest authority so that it can cause new problems if it does not have the ability to read policies in each region in Indonesia.*

**Keywords:** local government, spatial planning, Omnibus Law